DINAMIKA POLITIK MALAYSIA: *UNITED MALAYS NATIONAL ORGANIZATION* (UMNO) & PENGUNDURAN DIRI MAHATHIR MOHAMAD DI 2016

Jovan Prima Firmansyah

ABSTRAK

Tulisan ini membahas *United Malays National Organization* (UMNO) dan pengunduran diri Mahathir Mohamad dari partai tersebut di 2016. UMNO sebagai partai politik yang dominan dalam perpolitikan Malaysia sangat berperan dalam membentuk perjalanan Negara itu. Sejak berdiri di tahun 1946, berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaysia hingga peran Para Presiden UMNO yang juga merupakan Perdana Menteri (PM) Malaysia, memperlihatkan sebuah realitas politik yang menarik untuk dicermati. Mahathir Mohamad sebagai salah satu tokoh yang pernah menjabat Presiden UMNO & PM Malaysia (1981-2003) di 2016 membuat suatu keputusan yang menyita perhatian. Pengunduran dirinya dari UMNO di 2016 merupakan tantangan bagi UMNO dalam dinamika politik di negeri jiran itu. Pengunduran diri yang merupakan sebuah pertimbangan politik untuk menekan UMNO sebagai partai politik yang dominan di Malaysia dalam dugaan kasus 1 *Malaysia Development Berhad* (1MDB) pada masa pemerintahan PM Najib Razak.

Kata kunci: UMNO, Pengunduran Diri Mahathir Mohamad, Partai Politik, Presiden UMNO, PM

ABSTRACT

This paper review United Malays National Organization (UMNO) and Mahathir Mohamad resignation from it in 2016. UMNO as a dominant political party in Malaysian politics have high role in shaping the country. Since establishment in 1946, UMNO have role on Malaysia's independence, thus the role of it's presidents and as Malaysia Prime Minister (PM) show that it's an interesting subject to observe. Mahathir Mohamad as UMNO's president & Malaysia PM (1981-2003) made a decision that create attention. His resignation from UMNO in 2016 is a challenge to it for the political dynamics of that country. He use it to push UMNO as a dominant political party on 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) case during PM Najib Razak rule.

Keywords: UMNO, Mahathir Mohamad Resignation, Political Party, UMNO's President, PM

I. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Malaya pada tahun 1957, perpolitikan di Malaysia selalu didominasi oleh *United Malays National Organization* (UMNO). Di sisi lain Mahathir Mohamad dikenal sebagai salah satu tokoh UMNO yang berpengaruh serta pernah mengisi posisi sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia serta Presiden UMNO selama 22 tahun (1981-2003).

Pengunduran diri Mahathir Mohamad dari UMNO di 2016 pada masa kepemimpinan Najib Razak merupakan pengunduran dirinya yang kedua semasa di UMNO. Mahathir Mohamad juga tercatat pernah melakukan hal serupa tahun 2008 di masa kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi.

Pengunduran dirinya yang kedua dari UMNO menjadi menarik di tengah tingginya tensi politik yang sedang berlangsung di Malaysia. Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMNO sebagai partai yang berkuasa di Malaysia, khususnya dalam proses demokrasi di negeri jiran tersebut.

Mahathir Mohamad sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh dalam kancah perpolitikan Malaysia mengundurkan diri dari UMNO dikarenakan partai itu dianggap sebagai mesin politik untuk melindungi penguasa, dalam hal ini PM Najib Razak yang juga merupakan Presiden UMNO. Adanya tuduhan permasalahan aliran dana dari lembaga investasi 1 *Malaysia Development Berhad* (1MDB) kepada rekening pribadi Najib Razak sebesar $680 juta (kurang lebih setara Rp 9 triliun) memanaskan tensi politik di Malaysia(http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160323131258-106-119248/mahathir-mohamad-gugat-najib-razak-atas-tuduhan-korupsi/). 1MDB merupakan suatu lembaga investasi yang juga berfungsi menyalurkan dana terhadap pembangunan di Malaysia, dimana Najib Razak merupakan pendiri sekaligus ketua dewan penasihatnya.

Mahathir Mohamad menganggap bahwa UMNO telah melenceng dari awal pendirian partai tersebut sebagai wadah aspirasi ras Melayu. Mahathir Mohamad menyatakan UMNO telah menjadi partai yang melindungi kepentingan Najib Razak.

II. RUANG LINGKUP & TUJUAN PENULISAN

Ruang lingkup penulisan ini akan berfokus pada UMNO sebagai partai politik yang mendominasi politik di Malaysia serta peran Mahathir Mohamad dalam partai tersebut. Meski ia tidak lagi merupakan tokoh yang sentral di partai tersebut, namun pengunduran dirinya pada 2016 menjadi sebuah realitas politik yang berdampak terhadap dinamika di UMNO maupun perpolitikan Malaysia. Penulisan ini akan mengeksplanasikan peran UMNO serta para presidennya dan hubungan Mahathir Mohamad dengan UMNO. Penulisan ini bertujuan untuk mendapat kejelasan tentang dinamika perpolitikan di Malaysia. UMNO sebagai partai yang mendominasi politik di negara tersebut mendapat sebuah tantangan dalam proses demokrasi saat ini. Pengunduran diri Mahathir Mohamad akan menjadi suatu pembuktian politik dalam membentuk proses perjalanan politik UMNO sebagai partai politik yang mapan.

III. PEMBAHASAN PERAN UMNO PADA PERPOLITIKAN MALAYSIA

Menurut Miriam Budiarjo (2008), terdapat empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. UMNO dalam perpolitikan Malaysia sejalan dengan fungsi-fungsi tersebut. Akan tetapi, pada permasalahan pengololaan konflik, UMNO harus membuktikan diri sebagai sarana dalam mendamaikan konflik politik yang sedang terjadi di Malaysia saat ini.

Di Malaysia sendiri, sistem partai politiknya adalah multipartai. Berdasarkan keanekaragaman dalam komposisi masyarakat, sehingga perbedaan ras, agama, atau suku bangsa lebih bersifat primordial dalam satu wadah saja.

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar partai-partai politik di Malaysia berdasarkan komposisi ras, beberapa contohnya seperti, UMNO yang mewakili ras Melayu, *Malaysian Chinese Association* (MCA) sebagai partai politik dari ras China, dan *Malaysian Indian Congress* (MIC) yang merupakan wadah aspirasi ras India. Meski di saat ini dalam perpolitikan Malaysia juga diwarnai partai-partai alternatif dari masing-masing unsur ras mapun agama seperti

Parti Islam Se-Malaysia (PAS), *Democratic Action Party* (DAP) hingga yang bersifat multi ras *Parti Keadilan Rakyat* (PKR) dengan Anwar Ibrahim sebagai tokoh utamanya.

UMNO merupakan partai yang dibentuk sejak 11 Mei 1946 jauh sebelum kemerdekaan Malaya di 1957. Partai itu dapat bertahan bahkan mendominasi panggung politik di negara tersebut hingga kini. UMNO sebagai partai politik yang awal pendiriannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Malaya, khususnya bagi kepentingan politik ras Melayu dapat dikatakan berperan sangat penting dalam percaturan politik Malaysia. Untuk mengukuhkan kedudukannya, UMNO melakukan koalisi politik dengan MCA lalu MIC. Secara bertahap terdapat partai-partai politik lain yang tergabung maupun pernah tergabung dengan koalisi yang pada awalnya disebut *Parti Perikatan,* dikemudian hari dikenal dengan nama Barisan Nasional (BN).

Peran UMNO yang dominan dalam perpolitikan Malaysia tidak terlepas dari peran para elit politiknya pada masa itu. Khususnya peran para presidennya, seperti Dato' Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi hingga Najib Razak.

Malaysia sebagai negara monarki konstitusional, dengan sistem pemerintahan parlementer, memiliki kepala pemerintahan seorang PM. Parlemennya terbagi atas dua kamar yaitu, Senat atau Dewan Negara yang beranggotakan 70 orang, 44 orang ditunjuk oleh Yang di-*Pertuan Agong* (Sultan yang terpilih dari pemilihan diantara sembilan Sultan dari tiap Negara Bagian di Malaysia) melalui saran dari PM, sedangkan 26 orang lainnya dipilih melalui *pilihan raya* (pemilihan umum). *House of Representatives* atau Dewan Rakyat beranggotakan 222 orang yang dipilih setiap lima tahun sekali.

Lahirnya UMNO melalui upaya ras Melayu menentang terciptanya *Malayan Union* yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Inggris. *Malayan Union* dianggap merugikan bagi ras Melayu, secara administratif Malaya berada di bawah Kerajaan Inggris. Hal lain yang dianggap merugikan, bangsa India dan Cina yang datang ke Malaysia sebagai pekerja, secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Malaysia (Mahboob & Musa, 2005).

Pada bulan Maret 1946, sebanyak 41 organisasi yang mewakili kepentingan ras Melayu mengadakan kongres di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Melalui kongres itu, tercapai kesepakatan untuk menciptakan suatu wadah dalam memenuhi aspirasi kepentingan ras Melayu. Pada 11 mei 1946 lahirlah UMNO, yang pada masa awalnya dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar merupakan ayah dari Hussein Onn yang kemudian menjadi PM Malaysia ketiga.

Dengan demikian, UMNO pada masa tersebut merupakan wadah yang memperjuangkan kepentingan ras Melayu. Sejak kelahirannya, UMNO telah banyak berperan dalam perpolitikan di Malaysia, mulai dari menentang *Malayan Union,* memperjuangkan kemerdekaan Malaysia, hingga mendominasi perpolitikan di negara itu melalui BN. Tentunya peran UMNO juga tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh di dalam UMNO pula, terutama para pemimpinnya yang disebut sebagai Presiden UMNO.

Malaysia sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, secara otomatis menjadikan Presiden UMNO yang terpilih merupakan seorang PM. Hal ini menjadi suatu praktik politik yang berjalan di negara tersebut, bahwa seorang Presiden UMNO merupakan syarat yang mutlak diperlukan untuk menjadi PM Malaysia (Hadi, 2005:191).

Kepemimpinan di Malaysia dari Tunku Abdul Rahman (1957–1970), kepada Tun Abdul Razak (1970–1976), kemudian Tun Hussein Onn (1976–1981), lalu Mahathir Mohamad (1981–2003), maupun Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009), hingga Najib Razak (2009-kini) telah berjalan tanpa adanya perebutan kekuasaan maupun penggulingan kekuasaan (Hng, 2004:xi). Sistem yang sudah berjalan, ternyata mempunyai sebuah mekanisme pergantian yang unik, terutama bagaimana seorang PM yang juga merupakan Presiden UMNO memiliki peran penting dalam proses pembentukan sistem politik di Malaysia.

Akan tetapi, saat ini Najib Razak yang merupakan PM sekaligus Presiden UMNO menghadapi tekanan politik melalui pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai salah satu tokoh berpengaruh di partai tersebut. UMNO sebagai partai politik yang mendominasi perpolitikan Malaysia

dengan Najib Razak sebagai tokoh utamanya mengalami realitas politik yang muncul dari tubuh UMNO itu sendiri melalui pengunduran diri Mahathir Mohamad dengan tuduhan kasus lembaga investasi 1MDB kepada rekening pribadi Najib Razak sebesar $680 juta (kurang lebih setara Rp 9 triliun).

Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari UMNO sebagai tekanan kepada partai tersebut memberhentikan Najib Razak sebagai Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia. Pengunduran dirinya merupakan keputusan politik, dampak dari UMNO sebagai partai politik yang digunakan oleh Najib Razak dalam dinamika politik yang saat ini sedang terjadi di Malaysia.

IV. PRESIDEN UMNO & PM MALAYSIA

Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang memengaruhi dengan pihak yang dipengaruhi, atau yang satu memengaruhi sementara yang lain mematuhi (Surbakti, 2010). Dapat dikatakan bahwa, kekuasaan mengacu kepada kemampuan dalam mengelola pengaruh antara satu individu/kelompok kepada individu/kelompok lainnya untuk mengikuti kehendak yang menggunakan pengaruh tersebut.

Mahathir Mohamad merupakan PM Malaysia sekaligus Presiden UMNO yang memiliki rekam jejak sebagai tokoh politik sangat berpengaruh pada masa kepemimpinannya (1981-2003).

Setelah mengakhiri kekuasaannya pada 2003, dinamika politik di Malaysia serta UMNO pada masa kepemimpinannya hingga terpilihnya Najib Razak sebagai PM sekaligus Presiden UMNO di 2009 tidak terlepas dari peran politik Mahathir Mohamad. Terdapat keterikatan antara Mahathir Mohamad serta UMNO yang menjadikan perpolitikan Malaysia di masa kini.

UMNO melalui peran para presidennya mengalami perjalanan politik yang panjang sejak masa kolonial Inggris di Malaya. Pasca Perang Dunia (PD) II, pemerintah kolonial Inggris mengagas *Malayan Union* di Malaya. *Malayan Union* dapat dikatakan, akan mengambil alih kekuasaan para sultan di Tanah Melayu dan menempatkan mereka di bawah

seorang Gubernur Inggris yang berkuasa penuh bagi Tanah Melayu. Para sultan tersebut hanya berfungsi sebagai simbol semata. Kemudian, munculnya pemberian kewarganegaraan menurut *Jus Joli* (hak seseorang untuk memeroleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya) menjadikan ras selain Melayu yang merupakan penduduk Malaya akan lebih mudah memperoleh kewarganegaraannya.

Malayan Union sangat ditentang oleh ras Melayu. Penentangan itu menjadikan ras Melayu menyatukan perpaduan sehingga pada 1946 terciptalah *Gabungan Melayu Semenanjung* yang dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar hingga kemudian melahirkan UMNO.

Berbagai tekanan terhadap *Malayan Union* oleh UMNO maupun sebagian besar ras Melayu, pada 21 Januari 1948, *Malayan Union* dibubarkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM). PTM tidak serta-merta menghilangkan kekuasaan pemerintah kolonial Inggris, namun peran para sultan tidak hanya sebagai simbol semata seperti pada masa *Malayan Union*. Melalui PTM, undang-undang negeri harus melalui persetujuan sultan terlebih dahulu. Undang-undang negeri juga memiliki kuasa terhadap pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan Agama Islam serta adat istiadat ras Melayu.

UMNO sebagai sebuah partai politik, telah berperan untuk menentang *Malayan Union*, sehingga kemudian melahirkan PTM. Kedudukan istimewa ras Melayu telah dikembalikan dan prinsip *Jus Joli* tidak lagi diberlakukan. Akan tetapi, kemudian muncul undang-undang kerakyatan yang mempermudah ras non-Melayu untuk memperoleh kewarganegaraannya, meskipun undang-undang itu tidak lagi menganut prinsip *Jus Joli*.

UMNO yang pendiriannya mengedepankan kepentingan ras Melayu, melalui peran Dato' Onn Jaafar mengusulkan agar PTM dapat meraih kemerdekaanya dengan cara menjadikan UMNO sebagai partai multi ras. Usulan tersebut ditentang oleh mayoritas anggota UMNO sehingga Dato' Onn Jaafar mengundurkan diri dari UMNO dan digantikan oleh Tunku Abdul Rahman.

Pada masa kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, UMNO bersepakat menjalin aliansi politik dengan partai

politik ras lain seperti MCA & MIC hingga kemudian koalisi tersebut awalnya bernama *Parti Perikatan* hingga kemudian berganti nama BN. Aliansi itu mampu mendorong pemerintah kolonial Inggris memberikan kemerdekaan kepada PTM pada 31 Agustus 1957.

Di tahun 1960, ancaman komunisme di sekitar wilayah Malaya menjadikan Tunku Abdul Rahman mencari suatu penyelesaian dengan menggabungkan Singapura, Sabah dan Sarawak ke dalam PTM, lahirlah Malaysia pada 31 Agustus 1963 (Samad, 1998:36).

Pada perkembangan Malaysia di tahun 1969, Lee Kuan Yew yang merupakan tokoh politik berpengaruh di Singapura melalui *People's Action Party* (PAP) menggagas pembentukan satu partai oposisi koalisi UMNO dengan nama *Malaysia Solidarity Consultative Convention*. Lee Kuan Yew juga mengkampanyekan paham *Malaysian Malaysia* (suatu kampanye politik yang menggagas persamaan hak dalam segala bidang bagi seluruh ras di Malaysia) untuk mengkritik dominasi ras Melayu dalam pemerintahan. Pernyataan Lee Kuan Yew tersebut menimbulkan gejolak dalam perpolitikan Malaysia, terutama di wilayah Singapura. Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan bahwa Malaysia tidak lagi memiliki kekuasaan atas Singapura. Demi menjaga kestabilan politik dan hubungan baik dengan Singapura, kebijakan yang diambil olehnya adalah memisahkan Singapura dari Malaysia pada 1965 (Noordin & Hussin, 2004: 77). Sedangkan Sabah dan Sarawak tetap berada dalam Malaysia.

Pada *pilihan raya* 1969 partai politik yang berlatar-belakang ras China mendominasi *pilihan raya* tersebut. Ras China melakukan pawai kemenangan di Kuala Lumpur, pawai tersebut kemudian menciptakan kerusuhan ras antara ras China dengan ras Melayu di 13 Mei 1969. Kerusuhan tersebut meluas selain di sebagian besar wilayah Kuala Lumpur, juga di sebagian besar wilayah Selangor.

Peristiwa tersebut menjadikan Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri sebagai PM maupun Presiden UMNO. Posisinya kemudian ditempati oleh Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak yang merupakan ayah dari Najib Razak membentuk pemerintahan darurat. Melalui pemerintahan darurat, muncul *New Economic Policy* (NEP). Suatu

strategi ekonomi atas dasar masih tertinggalnya ras Melayu dalam berbagai bidang dibandingkan ras lain di Malaysia.

Kerusuhan antara ras 1969 menghasilkan *Rukun Negara* yang berisi lima butir penting: Kepercayaan Kepada Tuhan, Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang, kemudian Kesopanan dan Kesusilaan. Kritikan terhadap dominasi ras Melayu dalam pemerintahan dilarang untuk menjaga kerusuhan ras tidak terulang kembali.

Beberapa hal yang menjadikan ras Melayu memiliki hak istimewa, diantaranya: memperoleh kemudahan di bidang pendidikan, kemudahan sebagai birokrat pemerintahan, kepolisian, angkatan bersenjata kemudian langkah-langkah ekonomi lainnya untuk memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi ras Melayu (Wariya, 1988: 149). Segala keistimewaan bagi ras Melayu tersebut kemudian diartikan sebagai *Ketuanan Melayu*.

Berbagai keistimewaan yang dimiliki ras Melayu tidak sepenuhnya bersifat mutlak dalam hal ekonomi. Pada kenyataannya dalam kegiatan ekonomi, ras non-Melayu tidak dihalangi, maupun disekat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ras Melayu memiliki akses yang lebih menguntungkan dibandingkan ras lainnya.

Tun Abdul Razak wafat karena penyakit leukemia pada 14 januari 1976 (Samad, 1998: 153), Tun Hussein Onn terpilih sebagai penggantinya. Setelah menjadi Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia, Tun Hussein Onn menunjuk Mahathir Mohamad sebagai *Timbalan*nya (wakilnya). Mahathir Mohamad yang sebelumnya menduduki posisi *Naib Presiden* UMNO (posisi tertinggi setelah timbalan, terdiri atas tiga orang yang terpilih) dipilih diantara para kandidat lain yang juga menduduki posisi itu, yaitu Ghaffar Baba dan Tengku Razaleigh Hamzah. Dari semua nama-nama tersebut, Tun Hussein Onn memilih Mahathir Mohamad sebagai *Timbalan*nya (*Ibid.*: 161). Pada tahun 1981, Tun Hussein Onn mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan digantikan oleh Mahathir Mohamad.

Masa awal kepemimpinan Mahathir Mohamad, *timbalan* pertamanya adalah Musa Hitam. Ketika itu duet kepimpinan mereka dikenal dengan nama 2M (singkatan dari Mahathir Musa). Terpilihnya Musa Hitam sendiri sebagai *Timbalan* PM setelah melalui pemilihan

kursi *Timbalan Presiden* UMNO pada 1981 (Ho & Chin, 2001: 2). Ketika itu Musa Hitam berhasil mengungguli Tengku Razaleigh Hamzah dalam pemilihan *Timbalan Presiden* UMNO melalui dukungan dari Mahatir Mohamad.

Akan tetapi, kedekatan hubungan tersebut tidak berlanjut bahkan kemudian pada pemilihan Presiden & *Timbalan Presiden* UMNO 1984 hubungan 2M mulai merenggang (Wariya, 1988: 85-86). Musa Hitam tidak puas terhadap keputusan Mahathir Mohamad yang menempatkan Tengku Razaleigh Hamzah dalam kabinetnya. Menurut Musa Hitam, Tengku Razaleigh Hamzah akan menggunakan posisinya di kabinet sebagai Menteri Perdagangan dan Perusahaan untuk memperluas pengaruhnya di dalam UMNO. Dengan adanya posisi tersebut menurut Musa Hitam, Tengku Razaleigh Hamzah memunyai ambisi untuk menjatuhkan posisi dirinya sebagai *Timbalan Presiden* UMNO yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap posisinya sebagai *Timbalan* PM (Wariya, 2005: 24). Ternyata Mahathir Mohamad tetap mempertahankan keputusannya, hingga kemudian menimbulkan kekecewaan bagi Musa Hitam.

Pada 1986, Musa Hitam meletakkan jabatannya sebagai *Timbalan* PM namun tetap sebagai *Timbalan* Presiden UMNO. Mahathir Mohamad kemudian memilih Ghafar Baba sebagai *Timbalan* PM. Pada saat itu, dalam perpolitikan Malaysia, *Timbalan* PM dan *Timbalan Presiden* UMNO diisi oleh dua orang yang berbeda (Khoo, 2003: 262). Musa Hitam kemudian bergabung dengan Tengku Razaleigh Hamzah untuk menentang kepemimpinan Mahathir Mohamad. Di masa itu, perekonomian Malaysia sedang mengalami kemunduran, di mana investor asing telah kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah Malaysia dikarenakan banyaknya tuduhan korupsi.

Dengan demikian, pada pemilihan UMNO 24 April 1987, Mahathir Mohamad bersama pendukungnya di antaranya Ghafar Baba dan Anwar Ibrahim berhadapan dengan Tengku Razaleigh Hamzah bersama pendukungnya antara lain Musa Hitam dan Abdullah Ahmad Badawi. Pihak yang pro dengan Mahathir Mohamad dikenal sebagai *Team A*, sedangkan

yang pro dengan Tengku Razaleigh Hamzah merupakan *Team B.*

Hasil pemilihan untuk posisi presiden dan *timbalan presiden,* Mahathir Mohamad maupun Ghafar Baba unggul dengan perolehan suara yang tipis. Total keseluruhan 1479 perwakilan UMNO, Mahathir Mohamad hanya meraih 761 suara, sedangkan Tengku Razaleigh Hamzah meraih 718 suara. Sementara itu, Ghafar Baba meraih 739 suara, dimana Musa Hitam meraih 699 suara (*Ibid.*:269-270). Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa pada saat pemilihan, terdapat keinginan yang tidak padu dalam suksesi kepemimpinan di UMNO terhadap kepemimpinan Mahathir Mohamad.

Pada titik ini meski terdapat keinginan yang tidak padu terhadap Mahathir Mohamad, namun dirinya mampu mengkonsolidasikan kelompok yang berseberangan dengan dirinya. Abdullah Ahmad Badawi yang tergabung dalam *Team B*, kemudian bersama beberapa tokoh lain ikut dalam konsolidasi Mahathir Mohamad pasca pemilihan itu.

Di pemilihan Presiden & Timbalan Presiden UMNO 1993, Anwar Ibrahim bersama Najib Razak, Muhyidin Yassin & Muhammad Taib tergabung dalam *"Team Wawasan"* yang mengkampanyekan diri mereka ke daerah-daerah wakil UMNO agar memilih mereka sebagai *Timbalan* Presiden serta *Naib* Presiden partai tersebut. Kampanye tersebut membuahkan hasil bahkan menjadikan Ghaffar Baba tidak mampu mengumpulkan suara awal untuk mencalonkan diri kembali sebagai *Timbalan* Presiden UMNO.

Pemilihan di masa itu menjadikan Anwar Ibrahim menjadi *Timbalan* Presiden UMNO, serta Najib Razak, Muhyidin Yassin & Muhammad Taib sebagai *Naib* Presiden UMNO. Abdullah Ahmad Badawi yang juga mencalonkan diri sebagai *Naib* Presiden UMNO tidak terpilih namun memiliki perolehan suara yang cukup baik sehingga dirinya tetap diberikan posisi penting di UMNO sebagai anggota Majelis Tinggi (MT) UMNO oleh Mahathir Mohamad, bahkan Badawi juga diberikan posisi menteri pada kabinet Mahathir Mohamad.

Mahathir Mohamad menempatkan Abdullah Ahmad Badawi sebagai proses mensejajarkan Badawi dengan Anwar Ibrahim dalam perpolitikan Malaysia. Meski kemudian di 1996 Anwar Ibrahim terpilih kembali sebagai *Timbalan*

Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia, tetapi di 1999 dirinya dikenakan tuduhan asusila sehingga menepikan Anwar Ibrahim dan sebaliknya menaikkan Abdullah Ahmad Badawi sebagai *Timbalan* Presiden UMNO.

Perseteruan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim juga dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi di Malaysia pada 1997. Anwar Ibrahim lebih memilih metode *International Monetary Fund* (IMF) dalam penyelesaian krisis di Malaysia, di sisi lain Mahathir Mohamad tidak sejalan dengan metode yang ditawarkan IMF.

Pemilihan Abdullah Ahmad Badawi pada 1998 dikarenakan pemecatan Anwar Ibrahim dari UMNO merupakan peran utama dari Mahathir Mohamad dalam mempersiapkan pengganti dirinya sebagai Presiden UMNO maupun PM Malaysia. Hingga kemudian pada 31 Oktober 2003, Abdullah Ahmad Badawi terpilih sebagai PM Malaysia dan Presiden UMNO menggantikan Mahathir Mohamad yang telah berkuasa selama 22 tahun di negara tersebut. Abdullah Ahmad Badawi terpilih sebagai PM dan Presiden UMNO dengan Najib Razak sebagai *Timbalan* PM sekaligus *Timbalan* Presiden UMNO.

Di 2008, melalui dinamika politik yang terjadi di Malaysia, memanasnya hubungan Abdullah Ahmad Badawi dengan Mahathir Mohamad, ia mengundurkan diri dari UMNO sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan Badawi dianggap tidak mampu dalam mengelola Negara Malaysia oleh Mahathir Mohamad. Melalui pengunduran dirinya, UMNO kehilangan 2/3 mayoritas suara di parlemen (http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160229202952-106-114419/rekam-jejak-mahathir-mohamad-dalam-politik-malaysia/). Hal ini kemudian menjadikan Najib Razak naik ke tampuk pimpinan UMNO sebagai Presiden sekaligus PM Malaysia di 2009. Sementara, Muhyidin Yassin terpilih sebagai *Timbalan* Presiden UMNO sekaligus *Timbalan* PM Najib Razak. Seiring dengan mundurnya Abdullah Ahmad Badawi, Mahathir Mohamad bergabung kembali dalam UMNO.

V. PENGUNDURAN DIRI MAHATHIR MOHAMAD DARI UMNO DI 2016

Memanasnya dinamika politik di Malaysia muncul sejak dua tahun

terakhir. Penahanan terhadap diri Anwar Ibrahim untuk kedua kalinya atas tuduhan asusila pada masa pemerintahan Najib Razak di saat mencuatnya dominasi PKR sebagai partai oposisi yang dikomandoi oleh Anwar Ibrahim.

Najib Razak yang memberhentikan Timbalan PM dan empat menteri lainnya dalam kabinetnya juga mengganti Jaksa Agung Malaysia yang sedang melakukan investigasi skandal 1MDB, terkait surat utang yang dikaitkan dengan dirinya.

Timbalan PM Muhyiddin Yassin, diberhentikan setelah ia secara terbuka meminta Najib menjelaskan skandal yang melanda 1MDB tersebut. Jaksa Agung Abdul Gani Patail, yang memimpin penyelidikan 1MDB digantikan Mohamed Apandi Ali. Disebutkan bahwa alasan kesehatan menjadi faktor pergantian jaksa agung yang akan pensiun pada bulan Oktober 2015 (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/najib-reshuffle-kabinet-ditengarai-untuk-bungkam-pengkritiknya).

Pada kepemimpinan Mohamed Apendi Ali, melalui investigasi yang dilakukan, mengatakan bahwa tuduhan $680 juta (sekitar kurang lebih Rp 9 triliun) di rekening pribadi Najib Razak merupakan "sumbangan pribadi" dari keluarga kerajaan di Arab Saudi yang ditransfer antara akhir Maret dan awal April 2013. Sebagian besar uang tersebut, Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali mengatakan telah dikembalikan (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160130_dunia_1mdb_malaysia_swiss)

Tuduhan terhadap Najib Razak yang bertujuan untuk menurunkan dirinya dari kekuasaan PM Malaysia juga diwarnai dengan aksi demo dengan tema Bersih. Aksi demo yang dipelopori oleh partai oposisi di Malaysia bahkan ikut dihadiri oleh Mahathir Mohamad.

Mahathir Mohamad juga mengkampanyekan sebuah aliansi dari elit-elit politik di Malaysia untuk mendesak Najib Razak mundur sebagai PM maupun Presiden UMNO. Mahathir mohamad menyerukan kepada rakyat Malaysia, terlepas dari berbagai perbedaan ras, agama, partai, aliansi politik, tua dan muda agar bersatu menyelamatkan Malaysia dari pemerintahan yang dipimpin oleh Najib Razak

(http://news.okezone.com/read/2016/03/05/18/1328520/mahathir-muhammad-mari-gulingkan-pemerintahan-najib).

Hal yang kemudian menjadi sebuah fenomena politik yang sangat menarik adalah ketika kemudian Anwar Ibrahim ikut mendukung gerakan yang dicanangkan oleh Mahathir Mohamad tersebut. Peta perpolitikan Malaysia yang sebelumnya diisi oleh perseteruan antara Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim, saat ini berbalik arah. Bersatu dalam mendesak pengunduran diri Najib Razak. Anwar menyatakan dia akan "mendukung posisi" orang-orang di masyarakat sipil, partai politik maupun individu, termasuk Mahathir Mohamad yang mendesak Najib Razak untuk mundur dari posisinya saat ini (http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160304151632-106-115354/anwar-ibrahim-dukung-mahathir-mohamad-desak-pm-malaysia-turun/).

Peran Mahathir Mohamad sebagai salah satu tokoh berpengaruh di UMNO kemudian menyatakan pengunduran diri dari partai tersebut di tahun 2016. Pengunduran dirinya sebagai suatu proses realitas politik yang akan dibuktikan oleh UMNO sebagai partai politik yang mapan mengenai dampak dari pengunduran diri Mahathir Mohamad tersebut. Partai politik sebagai wadah pengelolaan konflik, dalam hal ini UMNO akan memperlihatkan kelanjutan dinamika politik di Malaysia, khususnya dalam tubuh UMNO sendiri dengan pengunduran diri Mahathir Mohamad.

VI. KESIMPULAN

UMNO sebagai partai politik yang mendominasi perjalanan politik di Malaysia merupakan penentu dalam setiap kebijakan di Malaysia. Kebijakan-kebijakan di UMNO tidak terlepas dari dinamika para tokoh-tokoh politik pada partai tersebut, khususnya Para Presiden UMNO yang juga secara otomatis merupakan PM Malaysia.

Peran Mahathir Mohamad pada masa pemerintahannya sebagai PM Malaysia maupun Presiden UMNO telah memperlihatkan bagaimana dirinya menggunakan kekuasaannya secara efektif dalam memengaruhi individu/kelompok lainnya. Sebagai figur yang berpengaruh di UMNO, pengunduran diri pertama Mahathir Mohamad di tahun 2008 memiliki dampak lanjutan terhadap pengunduran diri Abdullah Ahmad

Badawi sebagai PM Malaysia & Presiden UMNO yang kemudian digantikan oleh Najib Razak.

Pengunduran diri kedua Mahathir Mohamad ditahun 2016 ini memunculkan tantangan bagi UMNO dibawah pimpinan Najib Razak. Tantangan untuk menyikapi apakah pengunduran diri Mahathir Mohammad dari keanggotaan UMNO memberi dampak lanjutan seperti yang pernah terjadi di tahun 2008. Pengunduran diri Mahathir Mohamad dari UMNO bukan merupakan akhir dari rekam jejak politiknya, sebaliknya sebagai awal dalam proses penyelesaian dinamika politik tersebut. Fungsi partai politik sebagai pengelola konflik menjadikan UMNO sebagai kunci utama penyelesaian masalah politik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hadi, Syamsul. 2005. *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto, Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia.* Jakarta: Pelangi Cendikiawan.

Hng Hung Yong. 2004. *5 Men & Ideas, Building National Identity.* Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd.

Ho Khai Long & Chin, James. 2001. *Mahathir's Administration, Performance and Crisis in Governance.* Singapura: Times Books International.

Khoo Boo Teik. 2003. *Paradoxes of Mahathirsm, An Intelectual Biography of Mahathir Mohamad.* Selangor Darul Ehsan: Oxford University Press.

Mahbob, Maizatul Haizan Mahbob & Bin Musa, Mohamad Zain. 2005. *Tinjauan Baru Politik Malaysia.* Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noordin, Mardiana & Hussiin, Hasnah. 2004. *Pengajian Malaysia.* Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Samad, Paridah Abd. 1998. *Tun Abdul Razak, A Phenomenon in Malaysian Politics.* Kuala Lumpur: Affluent Master Sdn Bhd.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.

Wariya, Chamil. 1988. *UMNO Era Mahathir.* Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

_____. 2005. *Naik, Jatuh Dan Bangun Semula.* Selangor Darul Ehsan: Marshall Cavendish Sdn Bhd.

INTERNET:

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160130_dunia_1mdb_malaysia_swiss

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160323131258-106-119248/mahathir-mohamad-gugat-najib-razak-atas-tuduhan-korupsi/

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160229202952-106-

114419/rekam-jejak-mahathir-mohamad-dalam-politik-malaysia/

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160304151632-106-115354/anwar-ibrahim-dukung-mahathir-mohamad-desak-pm-malaysia-turun/

http://news.okezone.com/read/2016/03/05/18/1328520/mahathir-muhammad-mari-gulingkan-pemerintahan-najib

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/najib-reshuffle-kabinet-ditengarai-untuk-bungkam-pengkritiknya.